

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU**

**Dzul Jalali Ikram<sup>1)\*</sup>, Intam Kurnia<sup>2)</sup>, Syarif Permana Salingkat<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[hello.ikramradja@gmail.com](mailto:hello.ikramradja@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[kintam.68@gmail.com](mailto:kintam.68@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[spsalingkat@gmail.com](mailto:spsalingkat@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan Kota Palu, Kelurahan Talise Puskesmas Talise, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu, serta beberapa masyarakat yang terdampak. Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah dan penyedia layanan kesehatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga medis yang terlatih khusus dalam penanganan HIV/AIDS, serta masih tingginya stigma masyarakat terhadap ODHA. Komunikasi antarinstansi cukup efektif, tetapi penyebaran informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai HIV/AIDS lebih luas dan stigma dapat dikurangi.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pencegahan, Penanggulangan, HIV/AIDS

## **ABSTRACT**

*His study aims to examine the implementation of HIV/AIDS prevention and control policies in Talise Village, Mantikulore District, Palu City. The study uses George C. Edwards III's policy implementation model, which includes aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, such as the Palu City Health Office, Talise Health Center, the Palu City AIDS Prevention and Control Commission (KPA), and several affected community members. Additionally, field observations and document studies were conducted to strengthen the research findings. The results of the study indicate that the HIV/AIDS prevention and control policies in Talise Village have been implemented Fairly well, especially in terms of coordination between government agencies and healthcare service providers. However, there are still some challenges, such as limited resources, a lack of trained medical staff specifically for HIV/AIDS handling, and the persistent stigma towards people living with HIV/AIDS (PLWHA). Communication between agencies is quite effective, but the dissemination of information to the public needs to be improved so that awareness of HIV/AIDS is broader, and stigma can be reduced.*

**Keywords: Policy Implementation, Prevention, Control, HIV/AIDS**

Submisi: 04-05-2025

Diterima: 04-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

## PENDAHULUAN

Tantangan terbesar dalam sektor kesehatan yang hingga kini menjadi perhatian global adalah penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Masalah kesehatan global ini mendapatkan perhatian utama karena dampaknya yang signifikan jika tidak ditangani. Sampai sekarang belum ada satu pun negara yang sepenuhnya bebas terhadap HIV/AIDS. Infeksi ini menimbulkan krisis multidimensional yang berdampak pada sektor kesehatan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan (Suharto, Pratama, dan Suprayitno, 2020). Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk memahami tantangan yang ditimbulkan oleh HIV dan AIDS serta upaya yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Mengatasi stigma dan diskriminasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan penanganan dan pencegahan.

HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) jika tidak menjalani pengobatan, yang merupakan tahap akhir dari infeksi dan ditandai dengan penurunan yang signifikan dalam daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari penyakit. Virus ini umumnya menular melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, air mani, dan ASI, serta dapat menyebar melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, ataupun melalui ibu dan anak pada masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Saat ini, meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, pengobatan antiretroviral (ARV) tersedia untuk membantu individu yang terinfeksi menjalani kehidupan yang sehat dan mengurangi kemungkinan penularan kepada orang lain. Di sisi lain, AIDS merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV dimana sistem kekebalan tubuh telah rusak sangat parah, membuat individu menjadi rentan terkena infeksi oportunistik serta beberapa jenis kanker langka. Meskipun tidak ada obat untuk AIDS, pengobatan ARV dapat memperlambat perkembangan penyakit dan memungkinkan individu untuk tetap sehat dan produktif. Pencegahan serta deteksi dini juga sangat penting dalam menekan penyebaran HIV dan mengurangi risiko perkembangan AIDS, (Pratama, 2018).

Menurut data dari United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) tahun 2021, terdapat sekitar 38,4 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV, dengan 1,5 juta infeksi baru setiap tahunnya dan 650.000 kematian terkait AIDS. Sementara itu, sekitar 10,2 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi HIV tidak mendapatkan layanan medis yang mereka butuhkan. Di Indonesia, kasus HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan, di mana berdasarkan data dari Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA), jumlah kumulatif penderita HIV hingga Maret 2022 mencapai 329.581 kasus, sementara jumlah kumulatif penderita AIDS mencapai 137.397 kasus. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah HIV/AIDS di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palu, pada periode 2023 hingga Desember 2024, tercatat 1.745 penderita HIV dan 381 kasus penderita AIDS di Kota Palu dari total 4.093 kasus di seluruh Sulawesi Tengah dan selama periode Januari hingga Juli, terdapat 6 orang yang terinfeksi HIV di Kelurahan Talise. Angka ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan edukasi mengenai HIV di Kota Palu untuk mengurangi penyebaran virus dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dari jumlah tersebut, data juga menunjukkan bahwa 19% dari kasus ini adalah perempuan, sementara 81% adalah laki-laki, dengan sebagian besar kasus terkait perilaku seksual menyimpang, seperti homoseksualitas (Dinkes Kota Palu, 2025).

Pusat layanan Kesehatan (Puskesmas) yang ada di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Puskesmas Talise memainkan peran penting dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV. Puskesmas ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan HIV, termasuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta menyediakan layanan tes HIV bagi masyarakat yang berisiko. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya dievaluasi. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi dan Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, yang mencakup beberapa aspek penting.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV di Kelurahan Talise Palu dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya pelaksanaan yang efektif. Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan aktivitas yang dilaksanakan sesudah arahan resmi dari suatu peraturan dikeluarkan, melibatkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil atau dampak yang diinginkan bagi Masyarakat.

Model implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), yang mencakup empat aspek, yaitu: komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen disposisi, dan struktur organisasi yang tidak mendukung. Setiap permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang spesifik serta solusi yang tepat agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan maksimal di tingkat lapangan.

Menyadari bahaya dan potensi penyebaran HIV dan AIDS yang cepat di kota ini dibandingkan dengan kota-kota lain di Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Palu telah mengambil langkah-langkah strategis untuk penanggulangan. Salah satu upaya utama adalah penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Pemerintah Kota Palu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu No 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) yang di sasarkan pada populasi kunci (WPS dan pelanggannya, waria, LSL, Penasun dan pasangannya).

Peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat strategi pencegahan, yang di sebutkan di pasal 3 ayat (1) kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integritas, partisipatif, dan berkelanjutan. Kegiatan penanggulangan di sebutkan pada pasal 5 ayat (1) Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan. Yaitu memberikan perlindungan bagi penderita, serta memastikan bahwa layanan kesehatan yang memadai tersedia bagi mereka yang terinfeksi. Namun, peraturan ini belum sepenuhnya efektif diimplementasikan di tingkat Kelurahan serta layanan kesehatan primer, seperti di Puskesmas Talise. Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai implementasi kebijakan ini, guna memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mencegah dan menangani HIV/AIDS bisa dijalankan secara baik untuk meraih tujuan dan target yang diharapkan.

## METODE

Dasar penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dasar filsafat untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah (eksperimen) dengan peneliti sebagai instrumen, analisis kualitatif menekankan makna, prosedur pengumpulan data dilakukan secara analisis.

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu bersifat kualitatif yang di mana menggunakan berupa teks dan juga beberapa data dokumen yang berkaitan dari hasil wawancara serta gambaran dari data-data tingkat penderita HIV/AIDS di Kota Palu. Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang berasal dari hasil wawancara dan hasil observasi serta data sekunder, berasal dari data-data temuan di lapangan berupa data dokumen atau hasil laporan terkait informasi pencegahan dan penggulungan HIV/AIDS di Kota Palu.

Teknik pengumpulan data, yaitu metode yang menggunakan data-data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini, orang-orang atau pihak yang terlibat langsung pada kebijakan pencegahan dan penggulungan HIV/AIDS di Kota Palu terdiri atas PJ HIV/AIDS dan IMS Dinas Kesehatan Kota Palu, Lurah Kelurahan Talise Kota Palu, Dokter Puskesmas Talise Kota Palu, Koordinator Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PHIV/AIDS, Puskesmas Talise Kota Palu, Pengelola Program KPA Kota Palu, Pasien test VTC, dan Pasien Program Prep.

Instrumen penelitian ini, yaitu alat yang Peneliti gunakan saat melakukan penelitian terdiri atas alat rekaman dan pedoman wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, (2014) yang meliputi 4 tahapan analisis yaitu data *collection*, data *display*, data *condenstion*, dan *conclusion drawing/verifikasi*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan Palu adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kesehatan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palu resmi berdiri pada tahun 2000. Tugas-tugas yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Palu dikelola oleh instansi pemerintah yang lebih besar, namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, akhirnya Dinas Kesehatan Kota Palu dibentuk untuk memfasilitasi layanan yang lebih efektif dan terfokus di tingkat kota. Visi kami adalah mewujudkan Kota Palu yang sehat, cerdas, dan mandiri dengan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan. Kami berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat, termasuk pengendalian penyakit, peningkatan status gizi, pencegahan penyakit menular, serta memastikan lingkungan yang sehat.

Dinas Kesehatan Kota Palu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Visi mereka adalah "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat." Untuk mencapai visi tersebut, mereka fokus pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas, termasuk peningkatan jaminan kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, serta penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Adapun program kerja unggulan Dinas Kesehatan Kota Palu, yaitu Palu Kota Sehat, Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern, dan BPJS gratis untuk warga tidak mampu, serta Satu Ambulance Satu Kelurahan. Program tersebut berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama (IKU) seperti Angka Harapan Hidup, Pencegahan dan Penanganan Stunting, dan Indeks Keluarga Sehat.

Pembangunan kesehatan Kota Palu secara umum bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan secara adil dan merata, meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terutama pada golongan rentan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan kesehatan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat serta meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan secara berkelanjutan. Adapun pihak-pihak yang turut serta terlibat dalam kebijakan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Palu, yaitu Puskesmas yang berada diseluruh kelurahan yang ada di Kota Palu khususnya dalam penelitian ini yaitu Puskesmas Talise. Selain itu, juga ada pihak swasta atau yang menjadi mitra Dinkes Kota Palu yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu (KPA).

Kota Palu merupakan kota dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Sulawesi Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palu menjadi daerah di Sulawesi Tengah dengan tingkat mobilitas tinggi, sehingga rawan terjadi penyebaran virus HIV/AIDS, karena sebagian dari pengidap adalah warga luar Kota Palu. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Palu, kasus HIV di Kota Palu sudah ada 1.745 pengidap HIV yang terdeteksi pada tahun 2002-2024.

Tingginya jumlah infeksi HIV/AIDS di Kota Palu disebabkan oleh prevalensi perilaku berisiko tinggi dalam penularan HIV/AIDS di kalangan populasi kunci, seperti Laki-laki Suka Laki (LSL), Wanita Pekerja Seks (WPS), serta keberadaan lokasi berisiko tinggi seperti lokalisasi tondo kiri, klub malam, dan panti pijat. Berdasarkan kelompok risiko tersebut, data yang diperoleh terdiri atas beberapa kelompok risiko, seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Kasus HIV berdasarkan Kelompok Risiko Kota Palu Tahun 2024**

No	Kelompok Risiko	Jumlah	Persentase
1	Pelanggan PSK	19	12,34%
2	LSL/Homoseksual/Gay	121	78,57%
3	Waria	7	4,55%
4	WPS (Wanita pekerja Seks)	7	4,55%

(Sumber: Dinkes Kota Palu, 2025)

Temuan kasus HIV tertinggi adalah sebanyak 121 orang (78,57%), yaitu kelompok Homoseksual Tinggi, 19 orang (12,34%) pada kelompok pelanggan PSK, dan yang ketiga sebanyak 7 orang (4,55%) pada WPS dan Waria. Faktor penyebab lainnya, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat Kota Palu mengenai pencegahan, penularan, dan penanganan HIV/AIDS. Rendahnya pengetahuan tentang penularan HIV/AIDS tentunya menimbulkan stigma negatif yang tinggi di masyarakat kepada ODHA. Stigma negatif masyarakat disebabkan oleh pemahaman yang salah mengenai penularan HIV/AIDS, sehingga banyak orang cenderung memilih untuk tidak memeriksakan dirinya. Hal inilah yang memicu semakin banyaknya populasi tertular namun tidak terlihat. Hal yang diperlukan ialah memperbaiki sudut pandang masyarakat terhadap ODHA, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang malu untuk memeriksakan dirinya.

Kelurahan Talise Kota Palu sebagai salah satu kelurahan terbanyak penduduknya yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Palu. Sebagai daerah yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdekatan dengan berbagai lokasi yang rentan terhadap penularan HIV, Kelurahan Talise menjadi fokus utama dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian. Berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan diri terhadap risiko HIV/AIDS. Berikut data kasus HIV/AIDS yang ada di Kelurahan Talise, yaitu:

Tabel 2.  
Data Kasus HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2024

No	Tahun	HIV	AIDS	Jumlah	Meninggal
1	2020	5	-	5	-
2	2021	8	-	8	-
3	2022	12	2	14	-
4	2023	15	1	16	-
5	2024	10	1	11	3
6	Jumlah	50	4	54	3

(Sumber: Dinkes Kota Palu, 2025)

Penyebaran kasus HIV/AIDS di Kelurahan Talise cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola perilaku berisiko yang melibatkan sejumlah individu dalam kelompok populasi kunci. Untuk itu, berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga kesehatan terus dilakukan di Kelurahan Talise. Sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS, seperti penggunaan kondom dan tes HIV secara rutin, menjadi salah satu strategi penting yang terus diperkenalkan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, serta penyediaan fasilitas untuk tes HIV yang mudah dijangkau. Pemerintah Kota Palu terus berupaya melakukan penyuluhan dan menyediakan tes HIV bagi masyarakat, dengan meluncurkan program *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) yang diselenggarakan secara gratis di beberapa puskesmas di kota tersebut. Program VCT ini bertujuan untuk menurunkan angka penderita HIV/AIDS, di mana masyarakat dapat melakukan tes untuk mengetahui apakah mereka positif terinfeksi HIV atau tidak. Setelah tes, pasien akan menerima konseling lebih lanjut. Proses tes ini dilakukan secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, kelompok yang berisiko tinggi juga akan disarankan untuk menggunakan PrEP (*Pre-Exposure Prophylaxis*) sebagai langkah pencegahan tambahan terhadap penularan HIV.

Selama proses pengobatan, jika ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) terputus dari pengobatan atau hilang (*lost to follow up*), pihak puskesmas akan berusaha menghubungi ODHA tersebut. Jika tidak ada respon positif, puskesmas akan mencoba memeriksa keadaan ODHA di tempat tinggalnya.

Namun, dalam beberapa kasus, masih ada ODHA yang berhenti pengobatan, biasanya karena rasa malu atau takut terhadap stigma negatif dari masyarakat sekitar. Untuk menangani ODHA yang hilang atau putus pengobatan, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan LSM untuk melakukan pendekatan dan pendampingan lebih lanjut. Pendampingan ini juga mencakup perlindungan sosial untuk mengatasi masalah psikologis, stigma, kerentanansosial, dan diskriminasi yang dapat dialami oleh ODHA akibat status HIV/AIDS mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan dasar yang diperlukan.

Komunikasi merupakan indikator pertama dari variabel yang dikemukakan oleh George Edward III dalam teori implementasi kebijakan. Komunikasi dianggap sebagai salah satu variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks implementasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Komunikasi yang efektif tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dimulai dari di tingkat Kelurahan Talise, Puskesmas Talise, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu, dan Dinas Kesehatan Kota Palu. Untuk mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan di tingkat ini efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap cara penyampaian informasi, serta seberapa besar tingkat keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh Puskesmas Talise, KPA Kota Palu, dan Dinas Kesehatan Kota Palu menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Penyuluhan yang dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, program VTC Mobile, serta kunjungan ke sekolah-sekolah dan kelompok kerja di kelurahan, menggambarkan bahwa transmisi informasi dilakukan dengan beragam pendekatan yang bertujuan untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama populasi kunci. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam hal pemahaman yang lebih mendalam di masyarakat, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai penolakan tes HIV dan stigma sosial yang masih ada.

Kejelasan dalam komunikasi dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Talise dalam memberikan informasi yang mudah diakses, terutama melalui media sosial yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Informasi mengenai layanan VTC, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, disampaikan dengan cara yang terbuka dan mudah dimengerti, termasuk mengenai akses layanan gratis tanpa prosedur pendaftaran di loket. Namun, kendala masih ditemukan dalam pemahaman masyarakat terkait stigma sosial dan kekhawatiran terhadap privasi, yang menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah jelas disampaikan, ada hambatan dalam penerimaan informasi oleh sebagian warga.

Dalam hal konsistensi, kebijakan yang diterapkan oleh Puskesmas Talise dan Dinas Kesehatan Kota Palu menunjukkan bahwa mereka terus berupaya menjaga keselarasan informasi yang disampaikan. Program-program yang dilakukan, seperti penyuluhan yang menyesuaikan materi dengan audiens (misalnya, remaja dan kelompok berisiko) dan penjangkauan melalui LSM, konsisten dengan pedoman yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan Puskesmas Talise, yang selalu mengikuti SOP dalam menjalankan kegiatan penyuluhan untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Meskipun demikian, hambatan dalam konsistensi komunikasi muncul pada keterbatasan penyuluhan yang hanya dapat menjangkau sebagian kelompok berisiko, serta adanya tantangan dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tes dan penerimaan status HIV.

Sumber Daya menekankan pentingnya elemen-elemen seperti tenaga kerja, dana, fasilitas, dan dukungan pihak terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, ketersediaan tenaga medis yang terlatih, dana yang cukup, serta fasilitas kesehatan yang memadai menjadi faktor kunci. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kota Palu, Kelurahan Talise, Puskesmas Talise, KPA, dan masyarakat, juga sangat menentukan apakah kebijakan ini dapat dijalankan dengan efektif. Keterbatasan dalam salah satu elemen sumber daya dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan terkait pencegahan

dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise, penerapan teori George C. Edwards III terkait sumber daya terdiri dari staf, informasi, dan fasilitas Berdasarkan wawancara, implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, melibatkan berbagai sumber daya yang sangat penting, yaitu tenaga kesehatan, informasi, dan fasilitas. Tenaga kesehatan di Puskesmas Talise terdiri dari dokter, perawat, konselor, laboratorium, dan apoteker yang bekerja dalam tim untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Pelatihan yang rutin dan didukung oleh hibah dari Global Fund memberikan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan efektif. Selain itu, informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait HIV/AIDS sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media informasi yang disediakan oleh Puskesmas. Fasilitas di Puskesmas Talise juga sudah cukup memadai untuk mendukung layanan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam mengakses layanan tersebut, seperti adanya rasa takut atau malu dari sebagian masyarakat untuk melakukan tes HIV. Keseluruhan, sumber daya ini mendukung keberhasilan kebijakan, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS masih perlu mendapatkan perhatian lebih.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam teori George Edward III merujuk pada sikap, komitmen, dan orientasi pribadi para pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan disposisi menekankan bahwa sikap dan pandangan pribadi para pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, berkomitmen, terampil, dan termotivasi, implementasi kebijakan akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika disposisi pelaksana tidak mendukung, implementasi kebijakan bisa menghadapi hambatan atau kegagalan.

Bersumber dari pernyataan informan, sikap dan perilaku petugas kesehatan dalam memberikan layanan PrEP (*Pre-Exposure Prophylaxis*) menunjukkan disposisi yang mendukung implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Petugas kesehatan telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat PrEP dan cara kerjanya, serta secara rutin memantau kondisi pasien untuk memastikan pengobatan dilakukan dengan benar. Hal ini mencerminkan dukungan yang kuat terhadap pasien dalam mengikuti langkah-langkah pencegahan HIV/AIDS. Petugas juga memberikan informasi terkait pola hidup sehat yang memperkuat efektivitas pengobatan tersebut, yang membuat pasien merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, terdapat sedikit kendala dalam komunikasi, yaitu terkadang penjelasan yang diberikan terlalu cepat atau teknis, yang bisa mempengaruhi pemahaman pasien. Meskipun demikian, secara keseluruhan, disposisi positif dari petugas kesehatan tersebut tetap mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS dengan menyediakan layanan yang terarah dan peduli pada kesejahteraan pasien. Sesuai dengan seluruh pernyataan informan, disposisi dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise menunjukkan adanya sikap positif, komitmen yang kuat, dan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak terkait, meskipun terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, disposisi yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan, lembaga pemerintah, dan masyarakat sangat mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Meskipun ada berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan pandangan, dan stigma terhadap ODHA, disposisi positif dan komitmen kuat dari semua pihak terkait dapat memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif.

Struktur birokrasi, menekankan pentingnya sistem yang terorganisir dengan baik, dengan adanya hierarki, koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta prosedur yang terstandarisasi. Struktur ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu struktur birokrasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Struktur tersebut tidak hanya memastikan kelancaran koordinasi antar pihak yang terlibat, tetapi juga menjamin bahwa program pencegahan dan penanggulangan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat dan diimplementasikan secara efisien dan berkelanjutan.

Koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Puskesmas berperan sebagai penghubung

yang memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat PrEP dan cara mengakses layanan ini. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan lembaga masyarakat memastikan bahwa individu yang berisiko dapat dengan mudah mengakses layanan pencegahan yang disediakan. Selain itu, edukasi yang rutin mengenai pencegahan HIV melalui PrEP melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat, yang bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan PrEP sebagai langkah preventif. Hal ini menggambarkan adanya koordinasi yang efektif, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh George Edward III, di mana keterlibatan berbagai elemen dalam struktur birokrasi mendukung efektivitas kebijakan. Secara keseluruhan, program pencegahan ini berjalan dengan baik berkat koordinasi yang terjalin dengan efektif, dan pelayanan yang diberikan dirasakan memadai oleh masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan bagaimana struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang mendukung pencegahan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise menunjukkan koordinasi yang baik meskipun belum ada struktur birokrasi yang spesifik di tingkat kelurahan. Koordinasi antara Puskesmas Talise, Dinas Kesehatan Kota Palu, dan instansi terkait lainnya berjalan lancar, mendukung kebijakan yang bersifat preventif, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS, yang memerlukan edukasi yang lebih intensif. Meskipun demikian, komunikasi yang terbuka dan rutin antar lembaga, serta dukungan dari pemerintah kota melalui KPA, memperkuat pelaksanaan program. Kendala administratif seperti masalah surat-menyurat juga terkadang muncul, namun dapat diatasi melalui koordinasi yang baik. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik dan koordinasi yang efektif antara pemerintah dan lembaga masyarakat mendukung keberhasilan program pencegahan HIV/AIDS di Kelurahan Talise. Secara keseluruhan, *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan memberikan kerangka yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan, sementara fragmentasi menggambarkan pembagian tugas antar lembaga dalam struktur birokrasi yang lebih luas. Kedua konsep ini bekerja secara bersamaan untuk menciptakan implementasi kebijakan yang lebih efisien dan efektif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise telah berjalan dengan berbagai tantangan. Salah satu kebijakan yang menjadi acuan dalam implementasi ini adalah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa pencegahan HIV/AIDS harus dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk edukasi, promosi kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini di Kelurahan Talise masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, serta masih adanya stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Meskipun program Voluntary Counseling and Testing (VCT) sudah tersedia di Puskesmas Talise, partisipasi masyarakat dalam program ini masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, meskipun secara umum implementasi kebijakan ini telah sesuai dengan Perda, masih diperlukan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal edukasi masyarakat dan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat kelurahan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dalam kategori “cukup baik”, namun belum optimal. Penilaian ini didasarkan pada empat variabel utama dalam teori George C. Edwards III, yaitu, aspek Komunikasi antarinstansi pelaksana telah berlangsung dengan baik, namun penyampaian informasi kepada masyarakat masih lemah, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman dan masih tingginya stigma terhadap ODHA. Sumber daya yang dimiliki, baik dari segi tenaga kesehatan terlatih maupun fasilitas pendukung, masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan ideal pelaksanaan program secara maksimal. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen dan

kepedulian yang tinggi terhadap program, tetapi tidak didukung oleh insentif dan pelatihan memadai, sehingga kinerja mereka belum maksimal. Struktur birokrasi sudah tersedia, namun koordinasi antarlembaga dan SOP pelaksanaan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan terukur. Dengan demikian, walaupun terdapat upaya dan komitmen dari para pelaksana, lemahnya sumber daya serta belum optimalnya komunikasi publik dan sistem birokrasi membuat pelaksanaan kebijakan ini belum efektif sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan alokasi sumber daya, serta strategi komunikasi yang lebih masif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Pratama, Eko. 2018. *Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Palembang (Studi pada KPAI Kota Palembang Tahun 2017)*. Skripsi, Sriwijaya University. <http://repository.unsri.ac.id/13233/>
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, S., Gurning, F. P., Pratama, M. Y., & Suprayitno, E. 2020. Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Teladan. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, Volume 4, Nomor 2, hal. 131-136. e-ISSN: 2615-0441, p-ISSN: 2527-9548. DOI: [doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.147](https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.147)

## TENTANG PENULIS

Puji dan syukur Tuhan Yang Maha Esa di tahun 2025, saya Dzul Jalali Ikram, lahir di Kota Palu, pada tanggal 19 Oktober tahun 2002, telah menyelesaikan studi dan sebagai alumni Mahasiswa angkatan 2021 di Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Masa penyelesaian studi, selama ± 3 tahun 7 bulan, dengan predikat Yudisium Pujian sebagai hasil capaian usaha yang saya tempuh selama berkuliah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, dan seluruh keluarga, serta Dosen Pembimbing Utama yang juga selaku Koordinator Prodi. Administrasi Publik Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si. dan Dosen Pembimbing pendamping Syarif Permana Salingkat, S.Sos., M.Si. yang telah memberikan arahan, ilmu, pengetahuan, kritik dan sarannya. Semoga, riset tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu dapat bermanfaat bagi para pembaca.